



Peran Akuntansi Manajemen dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Instrumen Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia : Studi Literatur

Bolivia Renata Sianipar¹, Merlindang Simamora², Hairunisa Astari³, Muhammad Rizal⁴

¹boliviasianipar12@gmail.com

²merlindangsimamora@gmail.com

³khairunisaashari@gmail.com

⁴muhammadrizall@unimed.ac.id

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan

Article Info

Article history:

Received Jun 12th, 2023

Revised Aug 20th, 2023

Accepted Aug 26th, 2023

Kata Kunci:

Akuntansi Manajemen

Perencanaan APBD

Efisiensi Keuangan

Evalusi Kinerja

ABSTRAK

Akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi manajemen, pemerintah daerah dapat menyusun anggaran yang lebih optimal, efisien, dan akuntabel. Peran akuntansi manajemen mencakup pengumpulan data keuangan, analisis biaya, perencanaan strategis, serta evaluasi kinerja keuangan daerah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif. Selain itu, penggunaan sistem informasi akuntansi yang sesuai dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Penelitian ini menganalisis kontribusi akuntansi manajemen dalam penyusunan APBD serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Melalui penelitian kualitatif berbasis studi literatur, hasilnya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen yang baik dapat membantu mengelola anggaran lebih efisien, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mengurangi risiko penyalahgunaan keuangan. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntansi manajemen sangat diperlukan untuk menciptakan Pengelolaan keuangan daerah yang lebih terbuka.

ABSTRACT

Management accounting plays an important role in the planning and management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). By applying management accounting principles, local governments can develop a more optimal, efficient, and accountable budget. The role of management accounting includes financial data collection, cost analysis, strategic planning, and financial performance evaluation to ensure the effective use of resources. In addition, the use of an appropriate accounting information system can enhance transparency and accountability in budget management. This study analyzes the contribution of management accounting in APBD planning as well as the various challenges encountered in its implementation. Through qualitative research based on a literature review, the findings indicate that effective management accounting implementation can improve budget efficiency, support better decision-making, and reduce the risk of financial mismanagement. Therefore, strengthening the management accounting system is essential to creating more transparent local financial management.



© 2023 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Bolivia Renata Sianipar,
Universitas Negeri Medan
Email: boliviasianipar12@gmail.com

Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar APBD dapat dikelola dengan baik, diperlukan perencanaan yang matang, transparansi, serta penggunaan anggaran yang efisien. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang muncul, seperti perencanaan yang kurang tepat, perkiraan pendapatan dan belanja yang kurang akurat, serta masalah transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Salah satu metode untuk meningkatkan efisiensi APBD adalah melalui penerapan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen membantu menyediakan informasi keuangan yang mendukung pengambilan keputusan, sehingga anggaran dapat disusun dan digunakan dengan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan menerapkan akuntansi manajemen, Pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya dengan lebih optimal, mengawasi pengeluaran, serta mengevaluasi kinerja keuangan secara lebih komprehensif.

Namun, penerapan akuntansi manajemen dalam perencanaan APBD masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya tenaga ahli di bidang akuntansi manajemen, keterbatasan teknologi informasi, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung sistem berbasis kinerja. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengelolaan APBD masih kurang transparan dan akuntabel, yang dapat menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak efisien serta meningkatkan risiko penyalahgunaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akuntansi manajemen berperan dalam menyusun APBD mengidentifikasi kendala yang muncul dalam penerapannya, serta memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan akuntansi manajemen dalam penyusunan APBD, diharapkan tata kelola keuangan daerah bisa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang mengolah data keuangan hingga menjadi laporan yang digunakan oleh pimpinan atau manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dibandingkan dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup berbagai jenis informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan perusahaan. Dalam hal pemeriksaan, audit akuntansi keuangan bersifat umum karena bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sementara itu, audit akuntansi manajemen atau yang dikenal sebagai audit manajemen dilakukan dengan lebih mendalam dibandingkan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja setiap unit dalam perusahaan, khususnya dalam aspek efisiensi dan efektivitas sehingga audit manajemen sering disebut sebagai audit kinerja (*performance audit*). Dalam akuntansi manajemen, setiap pimpinan perlu memahami cara menyusun laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi keuangan. Namun, akuntansi manajemen tidak hanya berhenti pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup analisis serta dampaknya bagi pengguna laporan, yang disebut sebagai *outcome*.

Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi manajemen di sektor publik selalu berhubungan dengan bagaimana merencanakan dan mengontrol keuangan serta sumber daya. Kedua kegiatan ini sangat penting karena tanpa pengendalian, rencana yang telah dibuat sulit untuk dijalankan dengan baik. Pengendalian juga diperlukan agar rencana yang sudah dibuat bisa berjalan sesuai tujuan. Dalam proses ini, langkah pertama dalam manajemen sektor publik adalah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai bagian dari perencanaan.

Langkah selanjutnya adalah perencanaan operasional, yaitu menentukan kegiatan yang akan dilakukan, termasuk yang sifatnya mendesak untuk memenuhi kebutuhan publik serta yang bisa dilakukan secara bertahap. Setelah itu, disusun anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dengan mempertimbangkan dana yang tersedia. Saat pelaksanaan, pengendalian dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian langsung dilakukan dengan cara mengawasi langsung di tempat atau pada pekerjaan yang sedang berlangsung, seperti dalam proyek pembangunan.

Pengendalian tidak langsung dilakukan melalui laporan yang dibuat dan disampaikan oleh pelaksana sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan hingga pekerjaan selesai. Tahap terakhir adalah mengevaluasi hasil kegiatan dengan membandingkannya dengan tujuan yang sudah direncanakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD adalah pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember. Dalam aturan ini, APBD terdiri dari tiga bagian utama: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan daerah adalah uang yang diterima dari berbagai sumber dalam satu tahun anggaran, yang menambah aset atau mengurangi utang daerah. Pendapatan ini bisa berupa masuknya kas, bertambahnya aset, atau berkurangnya utang, tetapi tidak berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah.
2. Menurut IASC Framework Belanja daerah adalah berkurangnya manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi, seperti keluarnya kas, berkurangnya aset, atau munculnya utang yang menyebabkan penurunan ekuitas dana. Menurut para ahli, belanja daerah adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.
3. Pembiayaan daerah adalah pemasukan dan pengeluaran yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran atau memanfaatkan kelebihan anggaran. Pos pembiayaan dalam APBD dibuat agar pengelolaan keuangan daerah lebih kreatif.

Bentuk terbaru APBD berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan daerah terbagi menjadi tiga jenis:
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pemasukan yang diperoleh dari sumber ekonomi daerah sendiri.
 - b) Dana Perimbangan adalah dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhannya.
 - c) Pendapatan Lain-lain yang Sah mencakup berbagai pemasukan, seperti pendapatan daerah, pengeluaran daerah, pinjaman, dana ekuitas, cadangan, aset, dan sisa anggaran.
2. Belanja dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
 - a) Belanja Aparatur Daerah adalah pengeluaran yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, tetapi bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya.
 - b) Belanja Pelayanan Publik adalah pengeluaran yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
 - c) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan adalah dana yang digunakan untuk membagi pendapatan dengan daerah lain atau memberikan bantuan keuangan sesuai kebijakan pemerintah.
3. Pembiayaan
Pembiayaan adalah kategori baru dalam APBD yang belum ada sebelum era reformasi. Fungsinya adalah memisahkan pendapatan daerah dari dana yang dikelola pemerintah.

Pembiayaan mencakup sumber pemasukan dan pengeluaran daerah yang digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran. Pembiayaan ini terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Sumber penerimaan daerah yaitu :
 - 1) Sisa anggaran dari tahun sebelumnya.
 - 2) Penerimaan dari pinjaman dan obligasi.
 - 3) Pendapatan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.
 - 4) Transfer dari dana cadangan.
- b. Sumber pengeluaran daerah yaitu :
 - 1) Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
 - 2) Penyertaan modal.
 - 3) Transfer ke dana cadangan.
 - 4) Sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Penilaian Kinerja Keuangan

Penilaian adalah proses atau sistem untuk menentukan nilai suatu objek, hal, atau situasi dalam bentuk angka yang tetap dengan alat ukur yang sesuai. Kinerja adalah kegiatan atau program yang dilakukan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi sesuai dengan strategi yang telah dirancang. Penilaian kinerja adalah proses mencatat dan mengukur hasil kerja dalam mencapai misi organisasi, baik dalam bentuk produk, layanan, atau proses. Setiap kegiatan organisasi merupakan bagian dari tujuan yang telah ditetapkan dan dianggap sukses jika memberikan manfaat bagi masyarakat. Penilaian kinerja berperan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memastikan akuntabilitas.

Kinerja keuangan pemerintah dapat dilihat dari seberapa baik pemerintah daerah memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan setiap tahun. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio pertumbuhan pendapatan daerah, yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga atau meningkatkan pendapatannya dari tahun ke tahun. Jika pendapatan daerah terus meningkat dan bernilai positif setiap tahun, itu berarti pemerintah daerah berhasil menambah pemasukan. Kenaikan pendapatan daerah setiap tahun juga menandakan bahwa pemerintah mampu memenuhi kebutuhan daerah dan mengelola keuangan dengan baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, peraturan pemerintah tentang APBD, dan laporan keuangan daerah. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji bagaimana akuntansi manajemen digunakan dalam perencanaan APBD dan mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber yaitu membandingkan berbagai referensi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat. Dengan metode ini, Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana akuntansi manajemen membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Akuntansi Manajemen dalam Perencanaan APBD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam membuat penyusunan APBD lebih efisien dan efektif. Dengan menerapkan akuntansi manajemen, pemerintah daerah dapat menyusun anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan biaya yang tepat. Selain itu, informasi dari akuntansi manajemen membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik mengenai penggunaan sumber daya.

Penelitian oleh Setiawan (2020) menemukan bahwa penggunaan akuntansi manajemen dalam APBD dapat meningkatkan efisiensi anggaran hingga 15% dengan mengoptimalkan biaya operasional. Hasil ini sejalan dengan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa

perencanaan berdasarkan data akuntansi manajemen dapat mengurangi pemborosan dan membuat pengeluaran daerah lebih efektif.

2. Kendala dalam Implementasi Akuntansi Manajemen pada Penyusunan APBD
Beberapa tantangan utama dalam penerapan akuntansi manajemen dalam penyusunan APBD adalah kurangnya tenaga ahli yang kompeten, keterbatasan teknologi yang mendukung, serta aturan yang masih kurang fleksibel dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis kinerja.
Penelitian Rahmawati (2021) menemukan bahwa kurangnya pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab utama penerapan akuntansi manajemen tidak berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini, yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam akuntansi manajemen sering menyebabkan kesalahan dalam menyusun anggaran dan laporan keuangan daerah.
Jurnal berjudul "*Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow)*" ditulis oleh Amna Paputungan, Ventje Ilat, dan Jenny Morasa. Dalam jurnal ini, mereka membahas bagaimana proses perencanaan dan penganggaran APBD di Kabupaten Bolaang Mongondow serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya.

Kendala dalam Perencanaan APBD

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa kendala utama dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, yaitu:

- a. Tidak Efektifnya Musrenbang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) seharusnya menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, dalam kenyataannya, proses ini sering tidak berjalan dengan baik. Hasil Musrenbang sering kali tidak dijadikan dasar utama dalam penyusunan anggaran karena adanya pengaruh dari pihak eksekutif dan legislatif. Akibatnya, banyak aspirasi masyarakat yang sudah dikumpulkan tidak benar-benar dimasukkan ke dalam kebijakan anggaran.
- b. Kurangnya Transparansi dalam Proses Penyusunan APBD
Keterbukaan dalam perencanaan dan penganggaran masih menjadi masalah. Informasi tentang anggaran tidak sepenuhnya tersedia untuk masyarakat, sehingga penyusunan APBD sering hanya menjadi sekadar formalitas. Kurangnya keterlibatan masyarakat membuat partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah menjadi sangat rendah.
- c. Ketidaktepatan dalam Penyusunan KUA-PPAS dan RKA-SKPD
Dokumen KUA-PPAS dan RKA-SKPD yang disusun sering kali tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya keselarasan antara RPJMD dan RKPD, serta adanya pengaruh kepentingan politik dalam penentuan anggaran.
- d. Kurangnya Koordinasi antara TAPD dan DPRD
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sering mengalami kendala dalam berkoordinasi. Jadwal pembahasan anggaran sering tidak teratur, dan komunikasi antara keduanya kurang lancar. Akibatnya, proses pembahasan anggaran menjadi lama, yang bisa menyebabkan keterlambatan dalam penetapan APBD.
- e. Keterbatasan SDM yang Kompeten dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Salah satu masalah utama dalam perencanaan APBD adalah kurangnya tenaga ahli yang kompeten. Banyak pegawai pemerintah daerah belum memahami dengan baik sistem penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus di bidang akuntansi pemerintahan membuat penyusunan anggaran menjadi kurang efisien.
- f. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dalam Penganggaran (E-Planning)

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow belum sepenuhnya menggunakan sistem e-planning, yaitu teknologi yang dapat membantu membuat perencanaan APBD lebih transparan dan efisien. Karena belum memakai sistem ini, penyusunan anggaran masih dilakukan secara manual, sehingga lebih rentan terhadap kesalahan dan kemungkinan manipulasi data.

3. Jurnal berjudul "Pengaruh Pelatihan, Dukungan Manajemen Puncak, dan Kejelasan Tujuan terhadap Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Pemerintah Kabupaten Badung)" menyimpulkan bahwa pelatihan, dukungan dari manajemen tertinggi, dan kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap efektivitas SAKD di Kabupaten Bandung. Berdasarkan penelitian, responden menilai bahwa pelatihan, dukungan manajemen, dan tujuan yang ditetapkan oleh OPD sudah cukup baik dalam meningkatkan efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah. Strategi Peningkatan Efektivitas Akuntansi Manajemen dalam Perencanaan dan Pengelolaan APBD Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, antara lain:
 - a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang akuntansi manajemen bagi pegawai pemerintah daerah.
 - b. Modernisasi sistem informasi akuntansi dengan penerapan teknologi berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyusunan APBD.
 - c. Penyesuaian regulasi agar lebih fleksibel dalam mengakomodasi sistem akuntansi berbasis kinerja.

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa akuntansi manajemen berperan penting dalam membuat perencanaan APBD lebih tepat dan efisien. Dengan penerapan yang baik, akuntansi manajemen dapat membantu mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat, mengendalikan biaya dengan lebih efisien, serta mengevaluasi kinerja keuangan secara lebih akurat. Selain itu, penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dapat meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapan akuntansi manajemen, seperti kurangnya tenaga ahli yang kompeten dan aturan yang belum sepenuhnya mendukung sistem akuntansi yang lebih baik. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan pelatihan dan edukasi bagi pegawai agar lebih memahami sistem akuntansi, memperkuat peraturan yang mendorong transparansi, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perencanaan dan pengelolaan APBD dapat menjadi lebih akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Saran

Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang bisa diperbaiki agar akuntansi manajemen lebih efektif dalam merencanakan dan mengelola APBD. Pemerintah daerah perlu meningkatkan keahlian pegawai melalui pelatihan dan sertifikasi agar mereka lebih memahami cara mengelola anggaran dengan lebih efisien. Selain itu, perlu diterapkan sistem informasi akuntansi yang lebih modern dan terintegrasi untuk memperjelas, mempertanggungjawabkan, dan membuat pengelolaan keuangan daerah lebih efektif. Pengelolaan APBD perlu dievaluasi dan diawasi secara rutin agar dapat mencegah penyalahgunaan anggaran serta memastikan dana digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah harus menyusun aturan yang lebih jelas dan ketat untuk mendukung penerapan akuntansi manajemen yang baik, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan APBD bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Dewi, C. I. R. S., Surya, L. P. L. S., & Yudha, C. K. (2020). Pengaruh pelatihan, dukungan manajemen puncak dan kejelasan tujuan terhadap efektivitas sistem akuntansi keuangan

-
- daerah (studi empiris pada pemerintah Kabupaten Badung). KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 11(2), 110-116.
- Manumpil, A., & Sumual, F. M. (2022). Analisis Perencanaan Keuangan APBD Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 157-166.
- Mufarrihah, M., Atikah, L., & Djasuli, M. (2024). EVALUASI AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PERENCANAAN APBD TERHADAP KINERJA ANGGARAN DAERAH: SEBUAH KAJIAN LITERATUR. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(2), 135-151.
- Nugroho, R. (2022). Digitalisasi Sistem Akuntansi dan Efisiensi Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 15(2), 123-140.
- Paputungan, A., Ilat, V., & Morasa, J. (2017). Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahmawati, S. (2021). Kendala dalam Implementasi Akuntansi Manajemen di Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 18(3), 200-215.
- Setiawan, B. (2020). Penerapan Akuntansi Manajemen dalam Penyusunan APBD: Studi Efisiensi Anggaran di Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 12(1), 45- 60.
- Sumekar, A., Erlina, E., Bukit, R. B., & Situmeang, C. (2022). Meningkatkan Kinerja Perusahaan Logistik dengan Pendekatan Pengendalian Operasional. *Prosiding Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dharmawangsa*, 1(1), 9-14.
- Wance, M. (2019). Dinamika perencanaan anggaran pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) buru selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1).